

**ANALISIS STRATEGI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH
(STUDI KASUS DI KABUPATEN BATANG HARI)**

*Dr. H, Syaparuddi, SE, MSi,;Searmi Artis, SE.,MSi :Nurhayani, SE,MSi**

**Dosen Fakultas Ekonomi Program Studi IESP Universitas Jambi*

*Kampus Pinang Masak Jalan Raya Jambi – Ma.Bulian Km. 15
Mendalo Darat Jambi*

ABSTRAK

Penghapusan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia dewasa ini, dan karenanya menjadi syarat mutlak bagi pembangunan berkelanjutan. Pemerintah telah berupaya keras untuk menanggulangi kemiskinan ini. Hal tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan khususnya program berbasis pemberdayaan masyarakat dan program peningkatan kemandirian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Batang Hari pada saat ini tengah berupaya menurunkan jumlah penduduk miskin dari berbagai dimensi dengan menyusun dokumen perencanaan yang memuat strategi penanggulangan kemiskinan untuk daerah ini.

Populasi adalah seluruh rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang berada di Kabupaten Batang Hari. Dengan menggunakan presisi tertentu, jumlah sampel (sampling fraction) ditetapkan sebanyak 308 RTSM. Pelaksanaan semua kegiatan dalam strategi Penanggulangan kemiskinan ini, bukan berarti akan menyelesaikan semua permasalahan kemiskinan yang ada di Kabupaten Batang Hari. Karena permasalahan kemiskinan, bukan permasalahan sederhana tetapi permasalahan yang multi kompleks yang harus ditangani secara holistik dan simultan serta terus menerus, termasuk sikap hidup keluarga miskin yang ingin keluar dari kemiskinan.

Kata Kunci : Strategi Kemiskinan Penanggulangan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia memang perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius, karena saat ini kemiskinan, membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Data Biro Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2012 menunjukkan terdapat 29,13 juta penduduk miskin atau 11,96 persen dari total penduduk Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan daerahnya menunjukkan fenomena kemiskinan yang lebih luas di perdesaan dibandingkan perkotaan. Sebanyak 15,12% penduduk pedesaan adalah penduduk miskin, sedangkan penduduk miskin di perkotaan sebanyak 8,78% dari seluruh penduduk yang tinggal di perkotaan.

Sebagai salah satu daerah di Provinsi Jambi, Kabupaten Batang Hari, juga menghadapi fenomena yang sama yang terkait dengan kemiskinan. Perkembangan pembangunan Kabupaten Batang Hari sampai saat ini telah menghasilkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan dan juga telah dirasakan peningkatan hasil dan manfaatnya bagi masyarakat. Secara makro, perekonomian Kabupaten Batang Hari juga tumbuh dengan baik. Selama periode 2008 – 2011, pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Hari atas dasar harga konstan tahun 2000 adalah sebesar 6,49 persen tahun 2008, 5,14%, 6,05% tahun 2010 dan 7,11% tahun 2011.

Namun demikian, di sisi lain jumlah penduduk miskin di daerah ini juga relatif tinggi. Jika tahun 2009 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Batang Hari sebanyak 22.770 jiwa, hingga tahun 2012 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Batang Hari sebanyak 19.770 jiwa. Kondisi demikian menempatkan Kabupaten Batang Hari pada urutan ke 4 terbanyak penduduk miskinnya di Provinsi Jambi setelah Kota Jambi, Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat dengan persentase penduduk miskin sebanyak 10,13.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang Hari pada saat ini tengah berupaya menurunkan jumlah penduduk miskin dari berbagai dimensi. Oleh karenanya, agar upaya penurunan kemiskinan ini dapat efektif dan terarah sesuai dengan kondisi yang ada, maka perlu disusun dokumen perencanaan yang memuat strategi penanggulangan kemiskinan untuk daerah ini.

Rumusan Masalah

Bertolak belakang dari adanya upaya Pemerintah Kabupaten Batang Hari pada saat ini untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dari berbagai dimensi. Oleh karenanya, agar upaya penurunan kemiskinan ini dapat efektif dan terarah sesuai dengan kondisi yang ada, maka permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gambaran umum kondisi terkini dari kemiskinan di Kabupaten Batang Hari
2. Apakah strategi percepatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan wilayah kecamatan sudah tersusun di Kabupaten Batang Hari untuk periode perencanaan Tahun 2011 – 2016

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis gambaran umum kondisi terkini dari kemiskinan di Kabupaten Batang Hari
2. Untuk menyusun strategi percepatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan wilayah kecamatan di Kabupaten Batang Hari untuk periode perencanaan Tahun 2011 – 2016

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian dan Ciri-ciri Kemiskinan

Kemiskinan secara konseptual didefinisikan dalam berbagai dimensi oleh beberapa pakar dengan berbagai pendekatan sesuai dengan pengamatan dan sudut pandang objek yang diamati. Chambers (dalam Nasikun, 2001) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4)

ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Definisi kemiskinan sering didasarkan pada kekurangan uang dan pendapatan pertahun yang biasa diaplikasikan sebagai pengukuran. Terdapat pendekatan yang umum terhadap pendefinisian kemiskinan yaitu pendekatan absolut dan pendekatan relatif (Zastrow, 2000). Townsend (dalam Ensiklopedi Ilmu-ilmu sosial, 2000) menambahkan lagi satu pendekatan disamping absolut dan relatif, yaitu pendekatan kebutuhan dasar. Pendekatan ini berisikan dua elemen kunci, dimana elemen pertama berisikan bahwa pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sub—sistem akan pangan, papan, pakaian, dan barang-barang rumah tangga tertentu, dan elemen kedua jasa-jasa penting tertentu seperti : air minum yang aman, sanitasi, transportasi umum, pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan (*artificial*) (Mas' oed,1997)

- a. Kemiskinan alamiah berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
- b. Kemiskinan buatan lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas

ekonomi yang ada secara merata.

Sumber dan Penyebab Kemiskinan

Dari perspektif penyebab, kemiskinan dibatasi pada variabel diantaranya, perspektif fungsional, perspektif konflik, dan perspektif interaksi. (Zastrow,2000). Perspektif fungsional memandang kemiskinan itu ada atau terjadi dikarenakan tidak berfungsinya ekonomi (*disfungsional of economi*). Hal ini bisa dilihat dari cepat berkembangnya industrialisasi yang diakibatkan oleh kekacauan atau gangguan pada sistem ekonomi, sebagai contoh, orang yang kurang atau tidak memiliki ketrampilan kerja hanya dapat bekerja dengan kekuatan di aspek pekerjaan yang kasar dengan gaji rendah. Kemudian ketika mesin produksi sudah dijalankan secara otomatis, mereka diberhentikan tanpa mempunyai pekerjaan, uang atau ketrampilan kerja yang dapat dijual untuk memperoleh kerja. Perspektif konflik mengasumsikan bahwa kemiskinan terjadi karena banyaknya kekayaan di masyarakat modern. Kemiskinan tetap ada karena struktur kekuasaan menginginkan kemiskinan agar tetap ada. Mereka menegaskan bahwa pekerjaan orang miskin dapat dieksploitasi dengan membayar gaji yang rendah sehingga dapat memperoleh keuntungan yang besar bagi orang-orang kaya yang memiliki lapangan pekerjaan yang

pada akhirnya membuat mereka menjadi lebih kaya.

Selain itu, faktor-faktor penyebab kemiskinan dapat berupa karakteristik makro, sektor, komunitas, rumah tangga dan individu (World Bank Institute, 2002). Pada tingkat regional terdapat berbagai macam karakteristik yang mungkin berkaitan dengan kemiskinan. Meskipun demikian, secara umum tingkat kemiskinan tinggi di wilayah dengan ciri-ciri sebagai berikut: terpencil secara geografis, sumberdaya yang rendah, curah hujan yang rendah, dan kondisi iklim yang tidak ramah. Pada tingkat komunitas, infrastruktur merupakan determinan utama kemiskinan. Indikator pembangunan infrastruktur yang sering digunakan dalam pemodelan ekonometrik mencakup akses/kedekatan terhadap jalan aspal, ada tidaknya akses terhadap listrik, kedekatan terhadap pasar besar, tersedianya sekolah dan klinik diwilayah tersebut dan jarak ke pusat administrasi (ibu kota). Dalam konteks karakteristik rumah tangga dan individu diantaranya mencakup karakteristik demografi (misalnya: struktur dan ukuran rumah tangga, rasio ketergantungan-an, jender kepala rumah tangga), karakteristik ekonomi (misalnya aaspek ketenagakerjaan, pendapatan struktur pengeluaran rumah tangga, kepemilikan rumah tangga) dan karakteristik sosial (misalnya kesehatan dalam rumah tangga, pendidikan, tempat tinggal).

Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Upaya untuk menanggulangi kemiskinan dan menciptakan kesempatan kerja telah dilakukan pemerintah bersama dengan masyarakat melalui pengembangan dan penyelenggaraan berbagai program-program penanggulangan kemiskinan. Program tersebut mencakup upaya-upaya baik melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir sebagai modal usaha, pembangunan sarana dan prasarana dasar maupun pendampingan usaha.

Pada tahun 2010, dalam kerangka percepatan penanggulangan kemiskinan, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pada pasal 1 tersebut dinyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat (Pasal 1).

METODE PENELITIAN

Penelitian Analisis strategi penanggulangan kemiskinan daerah

Kabupaten Batang Hari ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a) Studi Literatur berbagai teori, penelitian, kajian serta peraturan dan kebijakan yang terkait kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan.
- b) Pengumpulan serta analisis data primer dan sekunder.
- c) Penyusunan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Batang Hari

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data sekunder yang dikumpulkan dari instansi terkait terutama dari BPS dan Bappeda Kabupaten Batang Hari.

Data yang dikumpulkan dalam survai ini terdiri dari dua kelompok data yaitu:

- a. Data pada tingkat kepala keluarga yang mencakup karakteristik individu, pendapatan dan pekerjaan kepala keluarga.
- b. Data pada tingkat rumah tangga yang mencakup struktur anggota rumah tangga, perumahan, pendapatan rumah tangga, kepemilikan aset produktif rumah tangga dan kesehatan.

Populasi adalah seluruh rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang berada di Kabupaten Batang Hari. Populasi rumah tangga sangat miskin didasarkan pada pendataan Program Samisake untuk semua Kecamatan di Kabupaten

Batang Hari sebanyak 1.834 Kepala Keluarga (KK). Empat Kecamatan terpilih adalah kecamatan yang memiliki jumlah KK sangat miskin terbanyak yaitu Kecamatan Maro Sebu Ulu (577 KK), Muaro Bulian (295 KK, tidak termasuk Desa Kilangan), Pelayung (251 KK) dan Muaro Tembesi (239 KK), sehingga total populasi untuk empat kecamatan tersebut sebanyak 1.395 KK Kemudian dari empat kecamatan tersebut diambil masing-masing empat desa yang mempunyai KK sangat miskin yang terbanyak.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada responden dengan berpedoman pada kuestioner yang disusun secara terpola dan terstruktur. Responden dalam hal ini adalah kepala keluarga atau kepala rumah tangga. Pelaksanaan wawancara dilakukan enumerator yang telah dilatih untuk kegiatan ini. Untuk menjangkau data yang akurat, pertanyaan-pertanyaan yang disusun dalam kuestioner dibagi atas empat sifat pertanyaan yaitu pertanyaan terbuka,

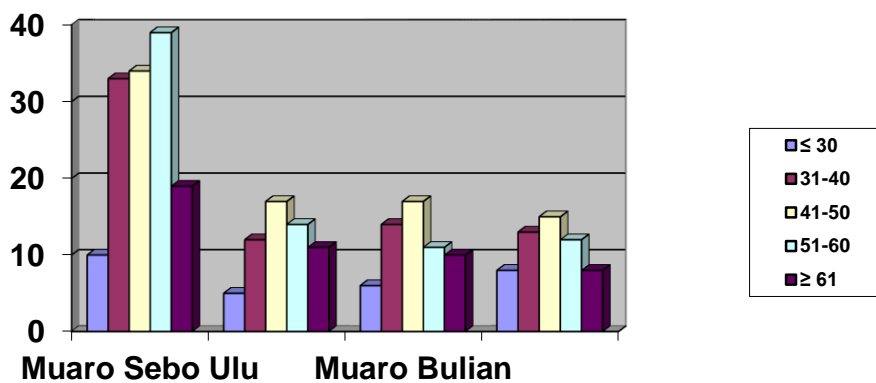
pertanyaan tertutup, kombinasi terbuka dan tertutup, serta pertanyaan semi terbuka.

HASIL PENELITIAN

Responden Berdasarkan Umur Kepala Rumah Tangga

Secara langsung maupun tidak langsung umur akan berpengaruh terhadap perilaku dan pola pengambilan keputusan individu. Pengaruh umur ini dapat dikaitkan dari sisi pengalaman maupun dari sisi kedewasaan berpikir yang menyertai peningkatan umur seseorang. Kelompok umur kepala rumah tangga untuk setiap Kecamatan berada pada kelompok umur 41-50 Tahun, dengan jumlah responden sebanyak 83 orang (26,95%), kemudian kelompok umur 51-60 dengan jumlah responden sebanyak 76 orang (24,68%) menduduki peringkat ke-2 terbanyak. Sedangkan jumlah responden yang paling sedikit berada pada kelompok umur ≤ 30 dengan jumlah responden sebanyak 29 orang (9,42%).

Gambar 4.1 Kelompok Responden Berdasarkan Umur Kepala Rumah Tangga



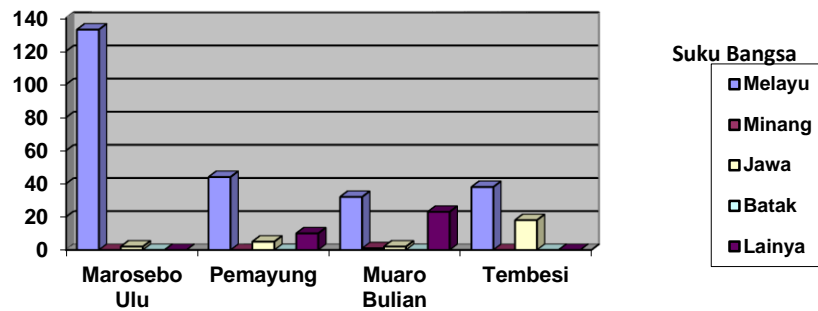
Jika dirinci pada masing-masing kecamatan, persentase kelompok umur kepala keluarga yang terbanyak di kecamatan Maro Sebo Ulu adalah pada kelompok umur 51-60 yang mencapai 39 KK atau sebanyak 28,89% dari 135 responden, kemudian kelompok umur 41-50 dan 31-40 masing-masing sebanyak 34 dan 33 KK. Sedangkan yang paling sedikit berada pada kelompok umur ≤ 30 yakni 10 KK (7,41%). Untuk Kecamatan Pelayung, jumlah KK terbanyak berada pada kelompok umur 41-50 tahun dengan responden sebanyak 17 KK atau 28,81% dari 59 responden, kemudian kelompok umur 51-60 sebanyak 14 responden (23,73%). Sedangkan yang paling sedikit berada

pada kelompok umur ≤ 30 yakni 5 KK (8,47%).

Responden Berdasarkan Asal Daerah Kepala Rumah Tangga

Dikaitkan dengan kemiskinan, persoalan kultur menjadi factor penting yang dapat mempengaruhi kemiskinan, meskipun tidak secara langsung pengaruhnya, namun tidak dapat disangkal lagi secara umum kultur yang menjadi karakteristik dari masing-masing penduduk dimana mereka berasal (suku) akan nampak dalam kehidupannya sehari-hari.

Tabel. 4.2 Kelompok Responden Berdasarkan Asal Daerah Kepala Rumah Tangga



Umumnya responden yang menjadi objek penelitian adalah berasal dari Jambi (suku Melayu Jambi) dengan responden sebanyak 247 KK atau 80,19%, kemudian Jawa 27 KK atau 8,77% dan tidak ada satupun orang Batak. Bila dirinci pada masing-masing kecamatan, untuk Kecamatan Marosebo Ulu responden (jumlah penduduk paling miskin) terbanyak berasal dari suku Melayu yang mencapai 133 KK atau sebesar 98,52%, kemudian suku Jawa 1,48% (dua orang). Sedangkan suku Minang, Batak dan lainnya tidak ada. Sama halnya dengan Kecamatan Marosebo Ulu, kondisi yang sama juga terjadi di Kecamatan Pelayung, dimana sebanyak 44 KK (74,58%) berasal dari suku Melayu dan suku lainnya 10 KK (16,95%), kemudian Jawa 5 responden (8,47%) dan tidak terdapat suku Minang dan Batak.

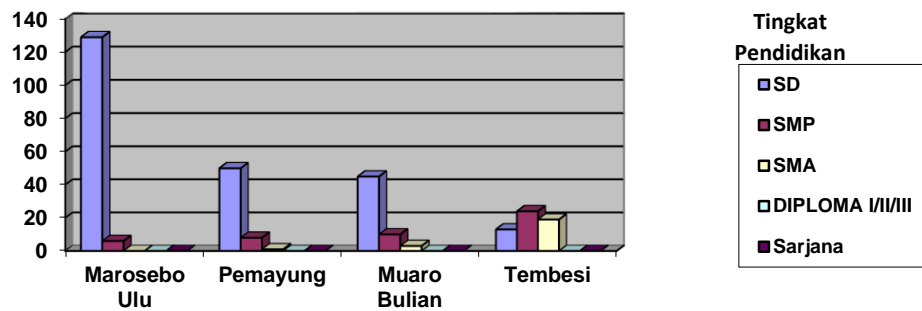
Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan kepala Rumah Tangga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari tingkat pendidikan responden KK paling miskin di Kabuapten Batang Hari sebagaimana terlihat pada Table 6.5, secara umum pendidikan KK adalah sekolah dasar (SD) yang mencapai 237 responden atau sebesar (76,95%). Ini menunjukkan betapa sebagian besar KK paling miskin di Kabupaten Batang Hari berpendidikan sangat rendah sekali, apalagi dalam kelompok ini termasuk pula responden yang tidak tamat SD. Sementara itu untuk jenjang pendidikan menengah masing-masing 48 responden (15,58%) berpendidikan SMP dan 23 responden (7,47%) berpendidikan SMA. Sedangkan untuk jenjang pendidikan Diploma dan Sarjana, tidak ada satupun responden (KK) paling miskin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan kepala keluarga rumah tangga sangat miskin di Kabupaten

Batang Hari adalah rendah. Oleh karenanya, kemiskinan di Kabupaten

Batang Hari salah satunya disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah.

Tabel. 4.3 Kelompok Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga

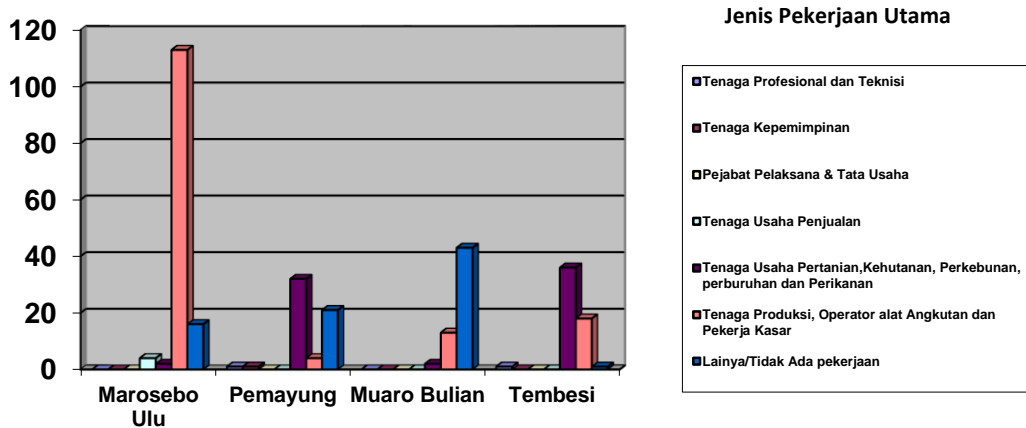


4.4 Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan Kepala Rumah Tangga

Tidaklah mudah bagi keluarga miskin untuk menemukan atau mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang diidamkan atau minat

dan keinginannya. Istilah memilih-milih pekerjaan bagi keluarga miskin terlalu tidak etis dan tidak logis bila dipandang dari dimensi pendidikan dan keterampilan ataupun dari ketersediaan lapangan pekerjaan baginya.

Tabel. 4.4 Kelompok Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan Kepala Rumah Tangga

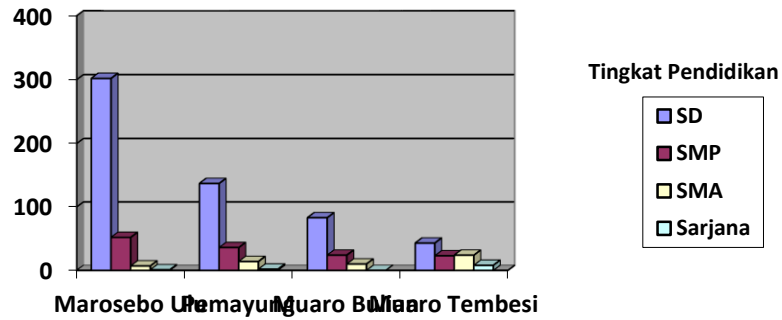


Dilihat dari jenis pekerjaan kepala rumah tangga yang menjadi responden sebagaimana terlihat pada Table 6.7, umumnya KK rumah tangga sangat miskin bekerja pada kelompok tenaga produksi, Operator alat Angkutan dan Pekerja Kasar (umumnya sebagai buruh kasar/pekerja kasar) dengan responden mencapai 148 KK (48,05%) dan bekerja pada usaha Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perburuan dan Perikanan (umumnya buruh tani) sebanyak 72 responden (23,38%). Sedangkan yang bekerja sebagai teknisi dan penjualan/perdagangan masing-masing 2 dan 4 responden.

Responden Berdasarkan Pendidikan Anggota Keluarga

Secara umum pendidikan anggota rumah tangga sangat miskin di Kabupaten Batang Hari relatif rendah. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa sebanyak 565 orang (73,76%) anggota keluarga responden berpendidikan SD, 135 orang (17,62%) berpendidikan SMP, 55 orang (7,18%) SMA dan hanya 11 orang (1,4%) yang berpendidikan Diploma/Sarjana.

Tabel. 4.5 Kelompok Responden Berdasarkan Pendidikan Anggota Keluarga

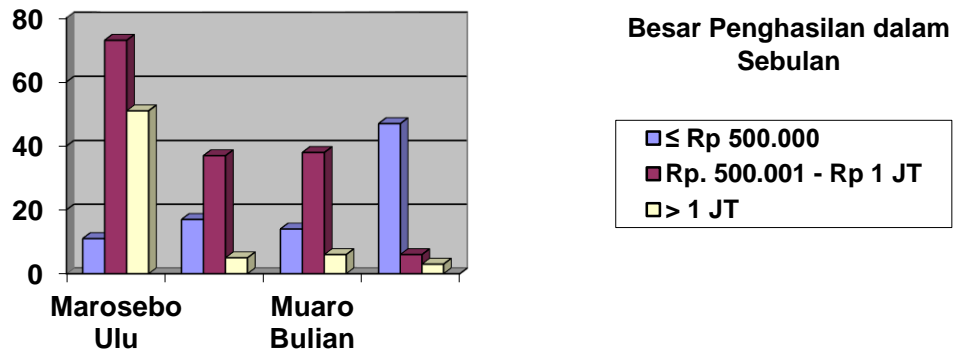


Meskipun secara umum tingkat pendidikan anggota keluarga miskin ini masih lebih banyak berada pada jenjang pendidik Sekolah Dasar (73,76%), namun dibandingkan dengan tingkat pendidikan rata-rata kepala keluarga miskin sebagai responden (dimana pendidikan Kepala Keluarga adalah SD = 76,95%; SMP = 15,58%; SMA = 7,4%; Diploma/Sarjana tidak ada), maka pendidikan anggota keluarga miskin di Kabupaten Batang Hari jauh lebih baik,

Responden Berdasarkan Penghasilan Sebulan

Pada Table 6.13 dapat diungkapkan besaran penghasilan kepala keluarga miskin di Kabupaten Batang Hari selama sebulan. Dari 308 responden, sebanyak 154 KK (50%) berpenghasilan Rp.500.001 – Rp.1.000.000, kemudian ≤ Rp 500.000 sebanyak 89 KK (28,90%) dan lebih dari Rp.1.000.000 sebanyak 65 KK (21,10%).

Tabel. 4.6 Kelompok Responden Berdasarkan Besar Penghasilan Sebulan



Bila dirinci menurut kecamatan, sebagian besar responden memiliki penghasilan sebulan Rp.500.001–Rp.1.000.000 yakni Kecamatan marosebo Ulu, Pelayung dan Muaro Bulian, sedangkan Kecamatan Muaro Tembesi responden terbanyak berpenghasilan ≤ Rp 500.000 dengan responden sebanyak 47 KK responden. Di Kecamatan Marosebo Ulu, dari 135 responden terdapat 73 (54,07%) responden berpenghasilan Rp.500.001 – Rp.1.000.000, kemudian sebanyak 51 responden (37,78%) berpenghasilan lebih dari satu juta dan 11 responden (8,15%) berpenghasilan ≤ Rp 500.000 perbulan. Sementara itu di Kecamatan Pelayung responden terbanyak berpenghasilan sebulan Rp.500.001–Rp.1.000.000 sebanyak 37 responden (62,71%), ≤ Rp 500.000 sebanyak 17 responden (28,81%) dan 5 responden (8,47%) dengan penghasilan lebih dari satu juta.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Strategi penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Batang Hari ini dapat digunakan oleh semua Dinas/Instansi dan Pemerintahan Desa di lingkup Pemerintahan Kabupaten Batang Hari dengan ketentuan:

1. Menjabarkan secara detail kegiatan-kegiatan yang ada dalam bentuk langkah-langkah kegiatan.
2. Setiap rencana kegiatan harus didahului dengan studi kelayakan, analisa kebutuhan dan sosialisasi.
3. Setiap perencanaan kegiatan harus dilengkapi dokumen UKL/UPL atau AMDAL bagi Kegiatan yang berdampak penting terhadap perubahan lingkungan Hidup.
4. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satker terkait harus memperhatikan prinsip KISS (Koordinasi, Integrasi,

Sinkronisasi dan Sinergis)

5. Setiap penjabaran langkah kegiatan harus memperhatikan permasalahan mendasar yang ada dan indikator tujuan, sehingga hasil akhir dari kegiatan tersebut dapat menjawab permasalahan mendasar yang ada.
6. Dilakukan review setiap tahun terhadap strategi penanggulangan kemiskinan daerah ini, berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan.

Pelaksanaan semua kegiatan dalam strategi Penanggulangan kemiskinan ini, bukan berarti akan menyelesaikan semua permasalahan kemiskinan yang ada di Kabupaten Batang Hari. Karena permasalahan kemiskinan, bukan permasalahan sederhana tetapi permasalahan yang multi kompleks yang harus ditangani secara holistik dan simultan serta terus menerus, termasuk sikap hidup keluarga miskin yang ingin keluar dari kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- , Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- , Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Alcock, P. 1997. *Understanding poverty*. London: Macmillan Press.

Bappenas-KPK. 2005. *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK)*. Bappenas-Komite Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta

Baswir, R (1997). *"Agenda Ekonomi Kerakyatan"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

BPS, 1999. *Pengukuran Tingkat Kemiskinan di Indonesia 1976-1999: Metode BPS*. Buku I, Seri Publikasi Susenas Mini 1999. Badan Pusat Statistik, Jakarta

Brodjonegoro, B. P. S. (2007). *Pencapaian MDGs dan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia*. Depok: Panitia Lokakarya Dewan Guru Besar Universitas Indonesia.

Chambers, Robert (1983), *Rural Development : Putting the last First*, Longman, London.

Carney. (1998). *Sustainable livelihood strategies*. London: International Institute for Environment and Development.

Clayton, B. D., David. D., & Olivier, D. (2000). *Rural planning in the developing world with a special focus on natural resources: Lessons learned and potential contributions to sustainable livelihoods*. London: International Institute for Environment and Development, and Department for International Development.

- Glueck, W F., & Jauch, L R. 1989. *Manajemen strategis dan kebijakan perusahaan (2 nd ed)*. Jakarta: Erlangga.
- Hariadi, B. 2003. *Strategi Manajemen: Strategi Memenangkan Persaingan Bisnis 2000*. Bayu Media Publishing. Jakarta
- Harris-White, B. (2005). Destitution and poverty of its politics-with special reference to South Asia. *World Development* 33:881-891.
- Henry Mintzberg, 1992. "Five Ps for Strategy" dalam *The Strategy Process*, H Mintzberg and JB Quinn eds., , Prentice-Hall International Editions, Englewood Cliffs NJ.
- Ikhsan, M (1999). *The Disaggregation of Indonesian Poverty : Policy and Analysis*. Ph.D. Dissertation. University of Illinois, Urbana
- Johnson G dan Scholes K. 1998. *Exploring Techniques Analysis and Evaluation in Strategic Management*. Prentice Hall Europe. Harlow, Essex
- Kartasasmita, Ginanjar (1995), *Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tinjauan Administrasi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Administrasi Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang, 27 Mei 1995.
- Mubyarto, dkk, 1994, *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*, Yogyakarta: Aditya Media
- Nanga, 2006. *Dampak Transfer Fiskal Terhadap Kemiskinan di Indonesia*. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Salusu,J. 1996. *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi NonProfit*. Grasindo.Jakarta
- Sayogyo, 1996; "Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum pangan", Yogyakarta: Aditya Media
- Tjondronegoro, S. M. P., Soejono, I. & Hardjono, J. (1996). Indonemiskinesia. Dalam M.G. Quilibria (Editor), *Rural poverty in developing Asia. Part 2: Indonesia, Republic of Korea, Philippines and Thailand*. Manila: Published by Asian Development Bank.
- van Oostenbrugge, J. A. E, van Densen, W. L. T. & Machiels, M. A. M. (2004). How the uncertain outcomes associated with aquatic and land resource use affect livelihood strategies in coastal communities in the Central Moluccas, Indonesia. *Agricultural Systems* 82:57-91.
- World Bank Institute. 2002. *Dasar-dasar Analisis Kemiskinan*. Edisi Terjemahan. Jakarta: Badan Pusat Statisti